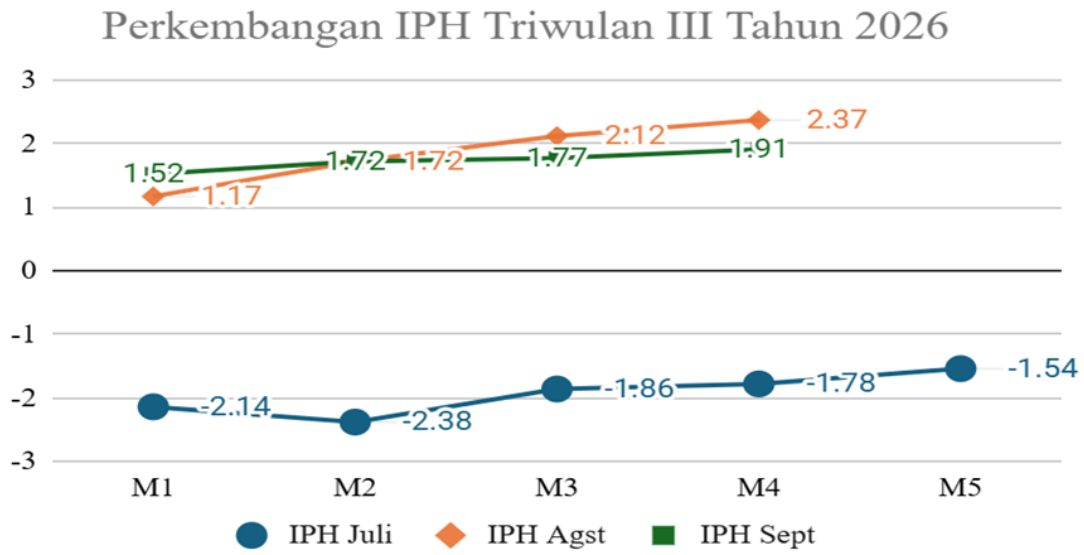
1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Kabupaten Bantul merupakan daerah non-IHK, sehingga tingkat inflasi tidak dihitung secara langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk memantau perkembangan harga, Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan Indikator Perkembangan Harga (IPH) yang mencerminkan pergerakan harga komoditas pangan strategis sebagai dasar perumusan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan.



   Sumber: BPS 2026, data diolah

   Perkembangan IPH Kabupaten Bantul pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan peralihan dari tekanan penurunan harga pada Juli menjadi kenaikan harga pada Agustus dan September. Pada Juli M1, IPH tercatat -2.14 dengan penurunan terutama dipengaruhi oleh cabai rawit -1.0201, daging ayam ras -1.0081, dan telur ayam ras -0.563. Pada Juli M2, IPH makin menurun menjadi -2.38 dengan andil terbesar berasal dari daging ayam ras -1.2081, cabai rawit -0.9763, dan bawang merah -0.6146.

   Selanjutnya, pada Juli M3, IPH meningkat menjadi -1.86 dengan komoditas penyumbang andil negatif terbesar meliputi cabai rawit -0.9979, bawang merah -0.6628, dan daging ayam ras -0.6472. Pada Juli M4, IPH sebesar -1.78 dipengaruhi oleh cabai rawit -1.1409, bawang merah -0.7373, dan daging ayam ras -0.4137. Sementara itu, pada Juli M5, IPH membaik menjadi -1.54 dengan andil negatif utama dari cabai rawit -1.1199, bawang merah -0.8037, dan telur ayam ras -0.295.

   Memasuki Agustus, IPH berbalik menjadi positif dan terus meningkat. Pada Agustus M1, IPH tercatat 1.17 dengan pendorong utama daging ayam ras 1.6126, cabai rawit 0.0933, dan jeruk 0.0788. Pada Agustus M2, IPH naik menjadi 1.72 yang didorong oleh daging ayam ras 2.171, beras 0.1169, dan jeruk 0.0788. Selanjutnya pada Agustus M3, IPH mencapai 2.12 dengan andil terbesar dari daging ayam ras 2.5265, beras 0.1504, dan jeruk 0.0788. Pada Agustus M4, IPH menyentuh 2.37 dengan kontribusi utama tetap dari daging ayam ras 2.7642, disusul

beras 0.1691 dan cabai rawit 0.1354. Tren ini menunjukkan bahwa daging ayam ras menjadi komoditas utama pendorong kenaikan IPH sepanjang Agustus.

Sedangkan pada September, IPH tetap berada di level positif dengan perubahan komoditas penyumbang. Pada September M1, IPH tercatat 1.52 dengan andil terbesar berasal dari cabai rawit 1.1516, daging ayam ras 0.5798, dan telur ayam ras 0.1221. Pada September M2, IPH naik menjadi 1.72 yang dipengaruhi oleh cabai rawit 1.3118, daging ayam ras 0.3832, dan cabai merah 0.1201. Pada September M3, IPH meningkat menjadi 1.77 dengan andil cabai rawit 1.2638, daging ayam ras 0.3182, dan cabai merah 0.3023. Selanjutnya, pada September M4, IPH mencapai 1.91 dengan kontribusi utama dari cabai rawit 1.3382, cabai merah 0.4125, dan daging ayam ras 0.2859.

Secara keseluruhan, perkembangan IPH Triwulan III menunjukkan pergeseran sumber tekanan harga. Pada Juli, IPH bernilai negatif yang didorong oleh penurunan harga cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah. Memasuki bulan Agustus, kenaikan IPH didominasi oleh daging ayam ras. Sementara pada September, tekanan harga bergeser dan semakin didominan oleh cabai rawit, disusul cabai merah serta daging ayam ras.

Selain itu, perkembangan Harga Bahan Pokok pada Triwulan III 2026 sebagai berikut:

1. Komoditas yang mengalami kenaikan harga

Komoditas	Harga/kg/liter			Harga Acuan Penjualan (HAP)
	Juli	Agustus	September	
Beras medium	Rp 13.122	Rp 13.170	Rp 13.520	Rp 13.500
Minyakita	Rp 15.588	Rp 15.615	Rp 15.620	Rp 15.700
Daging Ayam Ras	Rp 31.344	Rp 38.450	Rp 39.548	Rp 40.000
Daging Sapi	Rp 149.200	Rp 151.500	Rp 152.000	Rp 140.000
Cabai rawit merah	Rp 38.248	Rp 41.875	Rp 61.678	Rp 40.000-57.000

Sumber: DKUKMPP 2026, data diolah

Berdasarkan hasil pemantauan, kenaikan harga beberapa komoditas mulai terjadi pada Juli 2026 dan berlanjut hingga September 2026. Pada September 2026, harga daging sapi bahkan telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan produktivitas sapi potong yang berdampak pada keterbatasan ketersediaan pasokan (*supply shock*).

Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh tekanan biaya produksi (*cost-push inflation*) dan kompleksitas rantai pasok. Faktor yang berkontribusi antara lain kenaikan harga pakan, peningkatan harga di tingkat peternak, keterbatasan populasi ayam dari daerah asal, tingginya Harga Pokok Penjualan (HPP) perusahaan, keterlibatan broker, serta panjangnya rantai distribusi dan pola pembayaran secara tempo. Tekanan biaya pada sektor hulu, termasuk pakan, pupuk, dan obat-obatan, turut meningkatkan biaya produksi petani dan peternak sehingga mendorong transmisi kenaikan harga hingga tingkat konsumen (*spillover effect*).

Memasuki September 2026, harga cabai rawit mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat berkurangnya pasokan sebagai dampak musim kemarau ekstrem. Kondisi tersebut

mengganggu pola tanam dan meningkatkan risiko serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), sehingga produksi menurun. Ketidakseimbangan antara pasokan yang terbatas dan permintaan yang relatif tetap (*supply-demand mismatch*) selanjutnya mendorong kenaikan harga cabai rawit di tingkat konsumen.

2. Komoditas yang mengalami penurunan harga

Komoditas	Harga/kg/liter			Harga Acuan Penjualan (HAP)
	Juli	Agustus	September	
Bawang merah	Rp 39.952	Rp 32.123	Rp 28.446	Rp 36.500-41.500
Bawang putih sinco	Rp 37.250	Rp 34.750	Rp 33.280	Rp 38.000
Bawang putih kating	Rp 39.976	Rp 38.568	Rp 38.182	Rp 38.000

Sumber: DKUKMPP 2026, data diolah

Berdasarkan hasil pemantauan, harga komoditas bawang merah dan bawang putih menunjukkan tren penurunan secara konsisten sepanjang Triwulan III Tahun 2026. Penurunan harga bawang merah didukung oleh meningkatnya ketersediaan pasokan seiring dengan berlangsungnya masa panen raya di daerah sentra produksi. Sementara itu, penurunan harga bawang putih baik varietas Sinco maupun Kating dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan sebagai dampak tingginya realisasi impor pada Semester I Tahun 2026 yang mencapai sekitar 229,76 ribu ton. Realisasi impor tersebut membentuk *buffer stock* yang cukup kuat di dalam negeri sehingga mampu meredam gejolak harga dan mencegah terjadinya kelangkaan. Kondisi tersebut turut menjaga harga bawang putih tetap stabil, yaitu berada di bawah atau setara dengan HAP.

3. Komoditas dengan harga fluktuatif

Komoditas	Harga/kg/liter			Harga Acuan Penjualan (HAP
	Juli	Agustus	September	
Cabai Merah Keriting	Rp 29.904	Rp 28.663	Rp 41.272	Rp 37.000-55.000
Gula Pasir	Rp 16.960	Rp 16.944	Rp 17.312	Rp 17.500
Telur Ayam Ras	Rp 24.228	Rp 23.593	Rp 24.326	Rp 30.000

Sumber: DKUKMPP 2026, data diolah

Berdasarkan hasil pemantauan, komoditas cabai merah keriting, gula pasir, dan telur ayam ras mengalami fluktuasi harga sepanjang Triwulan III Tahun 2026, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada September. Meskipun mengalami peningkatan, harga ketiga komoditas tersebut masih berada di bawah HAP.

Cabai merah keriting mencatat volatilitas paling tinggi, dengan harga sebesar Rp29.904/kg pada Juli, turun menjadi Rp28.663/kg pada Agustus, kemudian meningkat signifikan sebesar 44% menjadi Rp41.272/kg pada September. Kenaikan tersebut dipengaruhi *supply shock* akibat kemarau panjang yang diperkuat fenomena El Nino. Kondisi kekeringan menurunkan produktivitas lahan dan mengurangi ketersediaan pasokan sehingga mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara itu, harga gula pasir relatif stabil pada level yang cukup tinggi, yaitu Rp16.960/kg

pada Juli, Rp16.944/kg pada Agustus, dan meningkat menjadi Rp17.312/kg pada September. Masa giling tebu rakyat selama musim kemarau sempat meningkatkan pasokan domestik, namun penurunan rendemen tebu akibat anomali cuaca membatasi tambahan pasokan sehingga harga tetap berada pada level tinggi.

Harga telur ayam ras juga menunjukkan pola fluktuatif, dari Rp24.228/kg pada Juli, turun menjadi Rp23.593/kg pada Agustus, kemudian kembali meningkat menjadi Rp24.326/kg pada September. Pergerakan harga telur dipengaruhi oleh biaya pakan yang menjadi komponen utama biaya produksi, termasuk bahan baku seperti bungkil kedelai dan gandum yang masih bergantung pada impor. Implementasi kebijakan *Durable Tariff Framework* oleh Amerika Serikat turut meningkatkan ketidakpastian perdagangan global dan berpotensi memengaruhi harga komoditas pangan serta bahan baku pakan di pasar internasional. Kondisi tersebut, yang disertai pelemahan nilai tukar Rupiah, meningkatkan biaya pengadaan bahan baku pakan dan selanjutnya menambah beban biaya produksi peternak. Di sisi permintaan, harga telur sempat menurun pada pertengahan kuartal seiring normalisasi konsumsi pasca Hari Besar Keagamaan, sebelum kembali meningkat pada September sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat, termasuk untuk kebutuhan hajatan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Geopolitik Global

Pada Triwulan III 2026, kondisi geopolitik dan perdagangan global masih menghadapi ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga melalui jalur energi, logistik, dan perdagangan internasional. Ketegangan di kawasan Selat Hormuz serta gangguan pada jalur pelayaran dan operasional terminal *Liquefied Natural Gas* (LNG) berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan logistik global. Meskipun terdapat perkembangan positif berupa kesepahaman gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang turut meredam tekanan harga minyak dunia, risiko gangguan pasokan dan distribusi energi masih perlu diwaspadai. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan harga komoditas yang bergantung pada energi maupun pasokan dari luar daerah. Sementara itu, penerapan *Durable Tariff Framework* oleh Amerika Serikat, sebesar 10% - 12,5% terhadap sekitar 60 negara termasuk Indonesia telah memicu perang dagang gelombang baru. Ketegangan dagang ini memaksa bank-bank sentral dunia untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher-for-longer*) guna menjangkar ekspektasi inflasi. Di Indonesia, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan (BI *rate*) pada level 5,75% untuk menjangkar ekspektasi inflasi nasional (sasaran 2,5 ± 1%) dan menjaga stabilitas nilai tukar.

    2. Kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah

Tekanan global tersebut turut meningkatkan risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang dapat memengaruhi biaya pengadaan bahan baku dan input produksi yang berasal dari luar negeri. Pelemahan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya bahan baku industri dan pakan ternak, sehingga dapat memberikan tekanan terhadap harga komoditas pangan olahan serta daging dan telur ayam ras di tingkat daerah. Selain itu, gangguan logistik dan ketidakpastian pasokan global berpotensi meningkatkan biaya input produksi sektor pertanian, termasuk bahan baku pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya. Peningkatan biaya produksi di tingkat hulu dapat menambah beban usaha tani dan selanjutnya

memengaruhi harga gabah di tingkat produsen.

3. Momentum Liburan

Liburnya aktivitas sekolah menghentikan sementara program pasokan makanan institusional seperti katering sekolah maupun program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan liburnya jutaan siswa, serapan pasar terhadap bahan pangan seperti telur ayam ras, daging ayam, dan berbagai jenis cabai mengalami penurunan drastis. Dikombinasikan dengan melimpahnya pasokan akibat musim panen hortikultura, harga pangan di pasar justru bergerak turun di bulan Juli.

4. Cuaca

Pada Triwulan III Tahun 2026, kondisi musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air yang diperparah oleh fenomena El Nino menjadi salah satu risiko utama pengendalian harga di Kabupaten Bantul. Kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam serta menurunkan produktivitas hortikultura, sehingga menekan pasokan pangan dan mendorong kenaikan harga.

5. Preferensi Petani

Preferensi dan kemampuan adaptasi petani dalam pengambilan keputusan usaha tani merupakan upaya mengantisipasi risiko produksi, terutama potensi gagal panen akibat cuaca ekstrem. Adaptasi dilakukan dengan memilih varietas padi berumur pendek dan tahan kering yang memiliki risiko gagal panen lebih rendah serta hasil lebih stabil. Selain itu, peralihan pola tanam dari padi ke palawija menjadi alternatif untuk menekan risiko kerugian sekaligus menjaga produktivitas lahan. Keputusan ini mencerminkan fleksibilitas petani dalam menyesuaikan pola usaha tani dengan kondisi lingkungan dan dinamika pasar.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Tahun 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul menetapkan **GEPLAK BANTUL (Gerakan Pangan Lokal dan Akses Ketersediaan Bahan Pokok Antarwilayah untuk Laju Inflasi Terkendali)** sebagai program unggulan dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Program ini menjadi instrumen operasional dalam mengimplementasikan strategi **4K+1**, yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan kolaborasi.

Melalui GEPLAK BANTUL, TPID Kabupaten Bantul mendorong penguatan ketahanan pangan lokal, optimalisasi akses pasokan antarwilayah, serta meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga secara berkelanjutan

- **Program Stabilisasi Pasokan Dengan Peningkatan Produktivitas:**

1. Ketersediaan Pasokan

Sepanjang Triwulan III Tahun 2026, TPID Kabupaten Bantul melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis, meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, serta memperkuat dukungan sarana dan prasarana

produksi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- **Penguatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**
- Produksi komoditas pangan strategis di Kabupaten Bantul selama Triwulan III Tahun 2026 meliputi 100.223,65 kuintal bawang merah, 15.141,51 kuintal cabai, 49.646,5 ton padi, dan 8.979,69 ton jagung. Capaian produksi tersebut menjadi salah satu indikator ketersediaan pasokan pangan daerah dalam mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya melalui penguatan produksi lokal dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
- Gerakan Tanam dan Panen yang didukung melalui APBD sebesar Rp 14.954.000, meliputi:

1. Gerakan Tanam Sorgum Bersama Bapak Bupati Bantul di Kelompok Tani Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri
2. Gerakan Panen Bawang Merah Bersama Menteri Pertanian RI di Bulak Parangtritis, Kretek, dan
3. Gerakan Panen Padi di KT. Ngudi Raharjo, Suren Kulon, Canden, Jetis.

- Pelatihan Pembibitan Tanaman Buah-buahan di Kelompok Tani (KT) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebanyak 7 kali yang didukung oleh APBD sebesar Rp 59.339.650
- Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sebanyak 14 kali yang didukung APBD sampai dengan September 2026 sebesar Rp 463.352.192.
- Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Gerdal OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 18 kali yang didukung oleh APBD sebesar Rp 15.750.000.
- Pelepasan Tyto Alba sebagai predator alami tikus untuk meminimalkan risiko gagal panen akibat serangan hama di Kelompok Tani Ngudi Raharjo, Suren Kulon, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis. Kegiatan dilaksanakan secara swadaya oleh kelompok.
- Pelaksanaan Program Pertanian Masuk Sekolah di Kabupaten Bantul merupakan kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta DPRD Kab Bantul sebagai upaya mengenalkan dunia pertanian kepada generasi muda sejak dini dengan memberikan bantuan bibit cabai, tomat dan terung. Kegiatan yang dilaksanakan sejak awal April hingga Mei 2026 di sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bantul kini telah memasuki pasa panen. Pihak sekolah didorong untuk memanfaatkan lahan yang dimiliki guna menghasilkan pangan sehat sekaligus menjadi sarana pembelajaran langsung bagi para siswa.
- Berdasarkan SK Bupati Bantul Nomor 263 Tahun 2026 tentang Status Siaga Darurat Kekeringan. BPBD Bantul aktif menyalurkan bantuan air bersih sebagai upaya penanganan dampak kekeringan dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak. Hingga pembaruan data 28 September 2026, tercatat sebanyak 3.766.000 liter air bersih telah didistribusikan dengan total 752 tangki kepada masyarakat di 8 kapanewon di Kabupaten Bantul seperti Pajangan, Piyungan, Dlingo, Imogiri, dan Pundong, sekaligus menghimbau masyarakat agar mewaspadai potensi kebakaran selama musim kemarau.
- **Penguatan Produksi Peternakan**
- Pelatihan Ternak Ayam Jowo Persilangan (Joper) dan pelatihan pakan sebanyak 23 kali yang didukung APBD sebesar Rp 428.787.270.
- Penetasan sebanyak 9.750 butir telur yang menghasilkan 5.850 *day old chicks* ***(****DOC****)***. Kegiatan tersebut didukung APBD sebesar Rp 25.575.000.
- Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan kepada kelompok ternak serta pelaku usaha peternakan yang wajib memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebanyak 5 kali,

disertai pendampingan audit NKV sebanyak 3 kali. Kegiatan tersebut didukung oleh APBD sebesar Rp 9.225.000.

- Pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) “Kambing” sebanyak 1.000 dosis dengan dukungan APBD sebesar Rp 121.192.984.
- **Penguatan Perikanan dan Ekosistem Perairan**
- Tebar benih ikan lokal jenis Nilem dan Tawes sebanyak 24.600 ekor di 3 lokasi, yaitu Gerbang Banyu Langit, Srimulyo, Piyungan; Kali Oyo, Kedungjati, Selopamioro, Imogiri; dan Kali Bedog, Gesikan, Pandak. Kegiatan didukung APBD sebesar Rp6.000.000 dan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.
- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada pembudidaya ikan sebanyak 9 kali dengan dukungan APBD sebesar Rp 450.000.000.
- Pengawasan usaha pembudidaya ikan sebanyak 3 kali yang dilaksanakan secara mandiri oleh OPD.
- Pengelolaan Kesehatan Hewan sebanyak 28 kali yang dilaksanakan secara mandiri oleh OPD.
- Produksi perikanan budidaya selama Triwulan III Tahun 2026 yaitu 3.286.896 kg.
- **Penguatan Infrastruktur Pertanian**
- Dalam rangka mendukung kelancaran produksi pertanian dan menjaga ketersediaan air untuk kegiatan budidaya, sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada 14 titik yang mencakup 7 Daerah Irigasi (DI), yaitu DI Widodo, Canden Kanan, Mergoyoso, Jotawang Kanan, Tegal, Gempolan, Karangploso, dan Mejing. Kegiatan rehabilitasi juga meliputi saluran pembuangan Bangeran, Kiringan, Depok, Jambon, Barjoyo, dan Buntung Mriyan Timbulharjo, serta rehabilitasi gorong-gorong dan pintu air. Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh APBD sebesar Rp2.905.024.520. Selain rehabilitasi, dilakukan pula operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang hingga Triwulan III Tahun 2026 telah dilaksanakan pada 55 Daerah Irigasi dengan dukungan APBD sebesar Rp1.261.909.540. Sementara itu, saat ini terdapat lebih dari 4.000 unit pompa irigasi yang telah tersedia untuk mendukung kebutuhan air lahan pertanian, terutama yang berada di sekitar aliran sungai. Pompa tersebut telah didistribusikan kepada kelompok tani yang memiliki lahan di dekat sumber air, seperti sungai maupun sumur, agar dapat dimanfaatkan secara optimal selama musim kemarau.
- Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan
  Terdapat 73 Kalurahan yang terdata melaksanakan program Ketahanan Pangan dengan total Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp24.581.193.512. Program Ketahanan Pangan sebagian besar dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di berbagai Kalurahan. Berdasarkan data montoring yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, program ini mencakup ragam sektor produktif seperti peternakan (sapi, domba, kambing, ayam/bebek petelur), perikanan darat (lele, nila, gurame, bawal), hortikultura (cabai, melon, edamame, pepaya, terong), hingga penyediaan sarana pendukung (pupuk organik, lumbung/gudang, dan rumah pengering).

Secara keseluruhan, berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi pangan daerah, menjaga kesinambungan pasokan, mengurangi risiko gangguan produksi akibat hama, penyakit, kekeringan, dan keterbatasan sarana produksi, serta mendukung ketahanan pangan dan pengendalian harga di Kabupaten Bantul.

- **Program Hilirisasi Dan Efisiensi Rantai Pasok Komoditas:**

2. Keterjangkauan Harga

Sepanjang Triwulan III Tahun 2026, TPID Kabupaten Bantul melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menjaga keterjangkauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan strategis bagi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten Bantul yang dilaksanakan setiap hari kerja dengan dukungan APBD sebesar Rp 6.175.000.
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pelaku usaha/distributor sebanyak 3 kali dengan dukungan APBD sebesar Rp 700.000.
- Operasi Pasar (OP) Minyakita dan Gula Pasir sebanyak 3 kali dengan dukungan APBD sebesar Rp 1.605.000.
- Pasar Murah sebanyak 2 kali, yaitu di Halaman GOR Guwosari, Pajangan, bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY dengan total penyaluran bahan pokok sebanyak 5 ton, serta di Halaman Kalurahan Caturharjo, Pandak, bekerja sama dengan Disperindag DIY dengan total penyaluran bahan pokok sebanyak 14 ton.
- *Bantul Creative Expo*, sebagai salah satu sarana mendukung akses masyarakat terhadap produk pangan dan produk unggulan daerah.
- Fasilitasi bazaar produk perikanan dalam rangkaian Bantul Creative Expo sebanyak 1 kali, dengan dukungan APBD sebesar Rp9.000.000, sebagai upaya memperluas akses pemasaran dan meningkatkan konsumsi produk perikanan masyarakat.
- Pengarahan strategis Bupati Bantul terkait Penataan Kelembagaan Badan Milik Kalurahan Bersama (Bumkalma) Kabupaten Bantul Tahun 2026, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat kalurahan.
- Pelatihan Pascapanen Hasil Perikanan sebanyak 3 kali, dengan dukungan APBD sebesar Rp45.000.000. Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam pengolahan dan penanganan hasil perikanan sehingga memiliki nilai tambah dan daya simpan yang lebih baik.
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Alih Teknologi Pengolahan Ikan di 8 lokasi, dengan dukungan APBD sebesar Rp168.000.000, untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah.
- Pasar Tani Kabupaten Bantul merupakan wadah pemasaran bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) dan UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul untuk memasarkan produk hasil pertanian dan olahan pangan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemandirian pangan daerah, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Pasar Tani telah beroperasi sejak Februari 2016 dan rutin diselenggarakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 08.00–12.00 WIB di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, serta terbuka untuk masyarakat umum.
- Pasar Kamis DKUKMPP merupakan wadah pemasaran bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan dan menjual berbagai produk unggulan, mulai dari kuliner khas, jajanan tradisional, sayur-mayur, hingga lauk-pauk. Kegiatan ini rutin diselenggarakan setiap hari Kamis di area sebelah timur gedung DKUKMPP Kabupaten Bantul.
- SOHIB Food (Sentra Olahan Ikan Bantul) merupakan pusat pemasaran produk olahan ikan lokal yang berlokasi di halaman Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Kegiatan ini diluncurkan untuk mendukung program Gemarikan sekaligus memperluas pemasaran produk olahan ikan. Bazaar rutin dilaksanakan setiap minggu pertama dan ketiga di Halaman Pendopo Parasamya, serta minggu kedua dan keempat di halaman Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui penguatan pemantauan harga dan stok, intervensi pasar, fasilitasi akses pangan dengan harga terjangkau, serta pengembangan nilai tambah produk pangan. Selain itu, kolaborasi dengan Bank Indonesia DIY dan Disperindag DIY turut memperkuat upaya stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Bantul.

3. Kelancaran Distribusi

Sepanjang Triwulan III Tahun 2026, TPID Kabupaten Bantul melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung kelancaran distribusi sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi daerah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Proses pembangunan jembatan sebanyak 5 lokasi, yaitu Jembatan Kweni–Druwo, Panggang–Paker, Dodogan–Pokoh, Sumberan, dan Pedes–Surobayan, dengan dukungan APBD sebesar Rp 3.103.332.800.
- Rehabilitasi jalan sampai dengan Triwulan III sebanyak 51 ruas, dengan dukungan APBD sebesar Rp 7.881.187.650. Kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan daerah.
- Pemeliharaan jalan sampai dengan Triwulan III sebanyak 91 ruas, dengan dukungan APBD sebesar Rp 2.319.685.736. Kegiatan tersebut guna menjaga kondisi jalan agar tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
- Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Program BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kalurahan Tahun 2026 dengan total pagu Rp20.450.360.000 saat ini sudah terealisasi Rp19.994.360 atau sekitar 97,77%. Dana BKK ini disalurkan secara terarah untuk membiayai program strategis berdasarkan pada Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Bantuan keuangan Khusus Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) sampai dengan September 2026 sebanyak 18 titik lokasi, dengan dukungan APBD sebesar Rp5.250.000, guna menjaga kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas.
- Inspeksi kendaraan (*ramp check* angkutan) pada 4 Perusahaan Otobus (PO) dan Jeep Wisata di Terminal Parangtritis dengan dukungan APBD sebesar Rp 1.000.000. Kegiatan tersebut dalam rangka memastikan kelayakan kendaraan dan mendukung keselamatan serta kelancaran angkutan orang.
- Inspeksi keselamatan pada daerah rawan kecelakaan di 13 titik lokasi, antara lain pada ruas Simpang Empat Sedayu–SLB Helen Keller, Perlintasan JPL 714–Tugu Perbatasan Sleman, Jalan Kemusuk–Pasar Menulis, Simpang Empat Pedes–SMA N 1 Sedayu, serta beberapa titik di wilayah Wonocatur, Gedongkuning, Karanglo Jogoragan–Kotagede, dan Maguwo, dengan dukungan APBD sebesar Rp2.750.000.
- Pelaksanaan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan dukungan APBD sebesar Rp15.750.000, dalam rangka mendukung penegakan ketertiban dan kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan.
- Pengembangan fasilitasi pemasaran Sentra Olahan Ikan Bantul (SOHIB) sebanyak 1 paket dengan dukungan APBD sebesar Rp 11.950.000 untuk memperluas akses pemasaran produk olahan perikanan dan mendukung kelancaran distribusi produk lokal.
- Pelaksanaan inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) merupakan upaya jemput bola melalui kolaborasi DKUKMPP dan DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk

mempermudah pedagang pasar rakyat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai klasifikasi KBLI yang dipersyaratkan. Layanan ini dilaksanakan di lokasi pasar dengan ketentuan minimal 20 pedagang pada setiap lokasi agar proses penerbitan NIB dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Inovasi ini bertujuan mengatasi kendala administrasi pedagang dalam mengikuti Operasi Pasar, khususnya penyediaan Minyakita, sehingga memperlancar pelaksanaan kegiatan, memperluas akses pedagang terhadap pasokan bahan pokok, serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

Berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan jaringan transportasi dan infrastruktur jalan tetap berfungsi optimal, konektivitas antar wilayah terjaga, serta mobilitas masyarakat dan distribusi barang berjalan lancar. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran rantai pasok bahan pangan dan barang kebutuhan masyarakat, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga di Kabupaten Bantul.

4. Komunikasi Efektif

Sepanjang Triwulan III Tahun 2026, TPID Kabupaten Bantul melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi efektif dan diseminasi informasi sebagai upaya meningkatkan koordinasi, transparansi informasi harga, serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan harga dan kebijakan pengendalian inflasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Penyelenggaraan rapat koordinasi sebanyak 6 kali dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan harga komoditas strategis serta merumuskan langkah-langkah stabilisasi harga yang diperlukan, dengan dukungan APBD sebesar Rp 2.250.000.
- Monitoring dan evaluasi harga daging ayam ras di Kabupaten Bantul, sebagai tindak lanjut terhadap perkembangan harga komoditas tersebut dan untuk memperoleh informasi kondisi pasokan, distribusi, serta pembentukan harga di tingkat pelaku usaha, dengan dukungan APBD sebesar Rp 750.000.
- Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebanyak 15 kali dengan dukungan APBD sebesar Rp 80.388.000 sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai konsumsi ikan sekaligus mendorong permintaan terhadap produk perikanan lokal.
- Peninjauan langsung lokasi Demonstration Plot (Demplot) Budidaya Air Payau di Padukuhan Pandansari, Wonoroto, Kalurahan Gadingsaring, Kapanewon Sanden oleh Bupati Bantul. Berbagai komoditas unggulan dibudidayakan secara terpadu di kawasan ini, meliputi lobster air laut, ikan bandeng, udang vaname, nila salin, hingga mangrove jack. Selain komoditas perikanan, kawasan demplot ini juga mengintegrasikan sektor pengembangan garam rakyat untuk mengoptimalkan potensi lahan pesisir.
- Pelaksanaan Pertemuan Rutin Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 1 kali, dengan dukungan APBD sebesar Rp700.000, sebagai forum koordinasi dan penyampaian informasi dalam mendukung kelancaran aktivitas TPI.
- Pembaruan (*updating*) perkembangan harga kebutuhan pokok melalui website dan aplikasi Bantulpedia sebanyak 12 kali, sebagai sarana penyediaan informasi harga pangan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Peliputan dan publikasi kegiatan Bantul Creative Expo, Pasar Murah, dan Gelora Sejam (Gerakan Belanja di Pasar Selama Satu Jam) dengan dukungan APBD sebesar Rp7.500.000, sebagai upaya memperluas jangkauan informasi program pemerintah kepada masyarakat.

Penerbitan Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/500.2.2/05485 tentang Gerakan ASN Belanja ke Pasar Rakyat Kabupaten Bantul setiap hari Jumat, sebagai bentuk komunikasi kebijakan untuk mendorong partisipasi ASN dalam berbelanja di pasar rakyat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi pelaku usaha pasar rakyat.

- Penyebarluasan informasi mengenai penurunan tarif masuk pada 9 pantai di wilayah Bantul bagian barat menjadi Rp5.000, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2026 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga serta Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagai upaya menyampaikan informasi kebijakan tarif kepada masyarakat.

Pelaksanaan berbagai kegiatan komunikasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, penyediaan informasi harga yang transparan, penyampaian kebijakan kepada masyarakat, serta edukasi untuk membentuk ekspektasi harga yang positif. Dengan komunikasi yang efektif dan informasi yang mudah diakses, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat mengambil keputusan secara lebih tepat serta turut mendukung stabilitas harga dan perekonomian daerah.

5. Kolaborasi

Sepanjang Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, instansi vertikal, TNI/Polri, DPR RI, BUMN, pelaku usaha, maupun kelembagaan di tingkat Kalurahan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan, kelancaran distribusi, peningkatan produksi, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

1. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Pusat

Sinergi dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui berbagai program yang mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan, antara lain:

1. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier (PITER) Tahap II Tahun 2026;
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier;
3. Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpompaan;
4. Pekerjaan Konstruksi Irigasi Bangunan Konservasi;
5. Pelaksanaan budidaya tematik bioflok sebanyak 2 kali;
6. Pemberian bantuan benih ikan nila dan lele kepada pembudidaya ikan sebanyak 30 kali;
7. Pemberian bantuan induk ikan nila dan patin kepada pembudidaya ikan sebanyak 3 kali;
8. Pemberian bantuan bahan baku dan mesin pakan kepada nelayan sebanyak 1 kali;
9. Pemberian bantuan mesin perahu motor tempel 30 PK kepada nelayan sebanyak 5 kali; dan
10. Pemberian bantuan alat penangkapan ikan kepada nelayan sebanyak 3 kali.
11. Pemberian bantuan 160 unit pompa air yang didistribusikan secara merata ke berbagai wilayah sentra pertanian guna mengantisipasi dampak musim kemarau.
12. Pemberian bantuan Irigasi Perpompaan (Irpom) dan Irigasi Perpipaan (Irpip) yang dibangun di 20 titik, sebagian besar lokasi terkonsentrasi di wilayah rawan kekeringan seperti Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Piyungan.

-

2. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan DPR RI

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pengembangan usaha kelompok di sektor perikanan, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh dukungan bantuan dari Komisi IV DPR RI, berupa 10 unit mesin kapal 30 PK, 33 unit bioflok, 3 unit ses biozas, 12 pokok induk basis, 2 paket peralatan pengolahan ikan, 450 ekor ikan air tawar, 960 ekor calon induk ikan air tawar, 2 paket bioflok, 1 unit mesin pompa, serta 219 unit alat penangkap ikan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, dan nilai tambah usaha perikanan masyarakat serta mendukung ketersediaan pangan daerah.

3. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah DIY

   Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan melalui:

   - Penanaman Perdana Lahan Pertanian Berbasis *Internet of Things* (IoT) di Lahan Banyu Kencono, Padukuhan Karet, Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret;
   - Sarasehan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kelompok Tani Margo Rukun, Kadisoro, Gilangharjo, Pandak;
   - Pelaksanaan Operasi Pasar Minyakita sebanyak 15 kali dan Gula Pasir sebanyak 2 kali;
   - Pemberian hibah budidaya ikan kepada pembudidaya ikan sebanyak 35 kali;
   - Pengerjaan fisik program padat karya infrastruktur Bantuan Keuangan Khusus (BKK) DIY di 124 lokasi telah selesai dilaksanakan, kegiatan tersebut mencakup pembuatan fasilitas publik seperti jalan cor blok, talud, dan saluran drainase yang dikerjakan oleh tenaga lokal masyarakat setempat mulai 28 September-17 Oktober 2026. Secara keseluruhan, program ini berhasil menyerap 3.224 orang tenaga kerja dengan paket bantuan per lokasi senilai Rp100 juta.
   - Pelaksanaan Pasar Murah di Halaman Kalurahan Caturharjo, Pandak, dengan total penyaluran bahan pokok sebanyak 14 ton; dan
   - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Satgas Saber Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan.
4. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok, Pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Pasar Murah di Kapanewon Pajangan. Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia DIY memberikan dukungan berupa subsidi biaya angkut kepada distributor sebesar Rp13.261.500 untuk mendukung kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat.

Selain itu, melalui Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Tahun 2026, diberikan bantuan berupa satu unit mobil pick up dan perangkat sprinkler air untuk mendukung optimalisasi produksi serta operasional Pasar Lelang Cabai Kretek. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kelancaran distribusi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung keberlanjutan pasokan cabai sebagai salah satu komoditas strategis dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bantul.

5. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kepolisian Resor Bantul

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok, Pemerintah Kabupaten Bantul berkolaborasi dengan Kepolisian Resor Bantul melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak dua kali di halaman Polres Bantul.

6. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Komando Distrik Militer 0729/Bantul

Melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap III Tahun 2026 di Padukuhan Rejosari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, dilaksanakan pembukaan jalan baru sepanjang 500 meter, pengecoran jalan sepanjang 650 meter, pembangunan talud sepanjang 130 meter, serta rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, memperlancar mobilitas warga, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, empat dari lima belas Jembatan Merah Putih Garuda di Kabupaten Bantul telah dioperasikan pada 23 Juli 2026, masing-masing berlokasi di Kalurahan Manding-Trirenggo (Bantul), Guwosari (Pajangan), Terong (Dlingo), dan Payak Wetan Srimulyo (Piyungan). Sementara itu, sebelas jembatan lainnya masih dalam proses pembangunan. Pembangunan infrastruktur melalui sinergi TNI dan masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

7. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kejaksaan Negeri Bantul

Melalui program JAMASAN (Jaksa Masuk Kalurahan) dan KETAPANG SUPRA (Ketahanan Pangan Suluh Praja) sebagai bagian dari penguatan Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa), Kejaksaan Negeri Bantul turut berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum aparatur kalurahan sekaligus mendorong optimalisasi potensi kalurahan untuk mendukung pembangunan dan ketahanan pangan masyarakat. Pada Triwulan III Tahun 2026, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak sepuluh kali di Kalurahan Patalan, Wonolelo, Panggungharjo, Pendowoharjo, Bawuran, Segoroyoso, Srihardono, Sendangsari, Sumbermulyo, dan Bangunharjo.

8. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu

Dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Rewulu menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul juga mengusulkan permohonan penambahan kuota BBM dan LPG 3 Kg bagi masyarakat di Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun 2026 untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi.

9. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kantor Perwakilan Bulog DIY

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Perum Bulog Kanwil DIY menyalurkan bantuan pangan selama Triwulan III Tahun 2026. Realisasi penyaluran bantuan pangan tersebut mencapai 4.161.060 kg beras kepada 138.702 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat serta menjaga keterjangkauan pangan bagi rumah tangga penerima manfaat.

Selain Bantuan Pangan, Bulog juga menyalurkan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Jagung Pakan dengan harga Rp5000/kg untuk membantu peternak petelur rakyat dan

mandiri. Penyaluran SPHP jagung sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga jagung pakan, ketersediaan pasokan, dan stabilisasi harga telur ayam ras.

10. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pupuk Indonesia

Dalam rangka mendukung produktivitas pertanian dan menjaga ketersediaan pasokan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani melalui kios resmi pupuk bersubsidi. Hingga Triwulan III Tahun 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 73% untuk pupuk urea dan 82% untuk pupuk NPK. Program ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha tani serta menjaga produktivitas pertanian di Kabupaten Bantul.

11. Pemerintah Kabupaten Bantul berkolaborasi dengan PT Madubaru

Pemerintah Kabupaten Bantul bersama PT Madubaru melaksanakan tanam perdana tebu pada areal pengembangan Kerja Sama Operasional (KSO) Madubaru Musim Tanam 2026/2027 di Kebun Depok, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek. Kegiatan tersebut mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian serta penguatan ketersediaan bahan baku sektor gula.

12. Pemerintah Kabupaten Bantul berkolaborasi dengan TVRI

Pemerintah Kabupaten Bantul secara aktif mendiseminasikan kebijakan Kabupaten Bantul melalui Program Jogja Jelang Siang di TVRI Yogyakarta. Melalui segmen Daerah Menyapa, acara ini kerap mengangkat isu-isu strategis daerah, seperti stabilitas harga, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang Triwulan III Tahun 2026 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali dengan menghadirkan Tim TPID Kabupaten Bantul.

13. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan BUMKal dan BUMKalMa

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan pendampingan kemitraan transaksi digital Fastpay untuk memperluas unit usaha serta meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan BUMKal Bersama (BUMKalMa). Kegiatan ini mendukung penguatan ekonomi kalurahan melalui perluasan akses layanan dan pemanfaatan transaksi digital.

14. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan TP PKK

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Capacity Building Mrantasi PKK pada TW II 2026 oleh Bank Indonesia. Telah dilaksanakan koordinasi Mrantasi (Masyarakat Lan Pedagang Tanggap Inflasi) di Bangsal Sasana Krida Rumah Dinas Bupati Bantul tanggal 6 Juli 2026. Mrantasi PKK di Kabupaten Bantul dilaksanakan di 14 Kalurahan dengan bantuan bibit cabe brengos dari Bank Indonesia sebanyak 150/kalurahan, dengan timeline kegiatan dimulai dari bulan Juni hingga November 2026. Pada tanggal 28 September 2026 TP PKK bersama tim monitoring telah melaksanakan monitoring ke-6 terkait penanaman cabai brengos dan telah dilakukan pemetikan cabai pertama di Kalurahan Wijirejo.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bantul pada Triwulan III Tahun

2026 menunjukkan peralihan tren dari kondisi deflasi pada bulan Juli menjadi tekanan kenaikan harga pada bulan Agustus dan September. Dinamika tersebut terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga tiga komoditas pangan strategis, yaitu cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras, yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Fluktuasi ini direviu secara komprehensif melalui respons kebijakan berikut:

1. Evaluasi Ketersediaan Pasokan

Pada Triwulan III Tahun 2026, penguatan ketersediaan pasokan di Kabupaten Bantul direalisasikan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pengendalian OPT, optimalisasi sarana produksi, mitigasi kekeringan, serta pemeliharaan jaringan irigasi. Tercatat, volume produksi komoditas pangan strategis mencapai 100.223,65 kuintal bawang merah, 15.141,51 kuintal cabai, 49.646,5 ton padi, dan 8.979,69 ton jagung. Selain itu, program penetasan telur menghasilkan 5.850 ekor *day-old chicks* (DOC) dari 9.750 butir telur, sementara produksi perikanan budidaya menyentuh angka 3.286.896 kg sebagai bagian dari upaya mendukung ketersediaan pasokan komoditas peternakan dan perikanan.

Dalam evaluasi pengendalian inflasi, capaian produksi dan dukungan infrastruktur tersebut perlu diimbangi dengan pola panen, kebutuhan konsumsi, pemantauan stok, serta perkembangan harga komoditas strategis. Lonjakan produksi belum tentu bisa menjamin stabilitas harga apabila terjadi anomali cuaca, serangan OPT, hambatan distribusi, atau ketidaksesuaian waktu panen dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan harus terus dioptimalkan guna memastikan ketersediaan pasokan berdampak langsung pada stabilitas harga pangan di Kabupaten Bantul.

2. Evaluasi Keterjangkauan Harga

Kebijakan keterjangkauan harga direalisasikan melalui pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok setiap hari kerja, pemantauan tingkat distributor sebanyak tiga kali, Operasi Pasar Minyakita sebanyak tiga kali, serta Pasar Murah sebanyak dua kali dengan total penyaluran bahan pokok sebanyak 19 ton. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan instrumen intervensi cepat *(quick response)* saat IPH menunjukkan tekanan kenaikan harga, khususnya pada kelompok bahan pokok penting.

Selain itu, penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 4.161.060 kg kepada 138.702 Penerima Bantuan Pangan (PBP) turut mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Upaya stabilisasi ini juga diperkuat melalui inovasi jemput bola penerbitan NIB bagi para pedagang tradisional guna mengatasi hambatan administratif dan mempercepat realisasi operasi pasar. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memantau dan mengintervensi pasar demi menjaga keterjangkauan harga. Kendati demikian, kegiatan pengawasan ini perlu ditindaklanjuti dengan tindakan yang lebih terarah dan tegas apabila ditemukan harga komoditas yang melampaui ketentuan yang berlaku.

3. Evaluasi Kelancaran Distribusi

Sepanjang Triwulan III Tahun 2026, TPID Kabupaten Bantul mendukung kelancaran distribusi melalui proses pembangunan lima jembatan, pemeliharaan 91 ruas jalan, dan rehabilitasi 51

ruas jalan. Upaya tersebut diperkuat dengan fasilitasi pemasaran Sentra Olahan Ikan Bantul (SOHIB) guna memperluas jangkauan pemasaran dan akses distribusi produk olahan perikanan lokal. Selain itu, juga dilaksanakan pemeriksaan kelayakan angkutan pada empat Perusahaan Otobus (PO) dan Jeep Wisata di Terminal Parangtritis, inspeksi keselamatan di 13 titik rawan kecelakaan, pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di 18 titik, serta penegakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Langkah strategis ini juga mencakup permohonan dukungan penambahan kuota BBM dan LPG 3 Kg bagi masyarakat di Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun 2026. Rangkaian kegiatan tersebut berhasil memperkuat konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mengamankan rantai pasok kebutuhan masyarakat. Stabilitas distribusi ini turut tercermin dari fluktuasi IPH yang terkendali dan relatif stabil. Kendati demikian, efektivitas infrastruktur terhadap pengendalian inflasi tetap perlu dioptimalkan melalui pemantauan berkala yang menghubungkan jaringan transportasi dengan kelancaran distribusi komoditas strategis. Dengan demikian, kebijakan distribusi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan juga pada peningkatan efisiensi rantai pasok guna memitigasi risiko kenaikan harga akibat hambatan distribusi.

4. Evaluasi Komunikasi Efektif

Penguatan komunikasi dilaksanakan melalui 6 kali rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi harga daging ayam ras, pembaruan informasi harga kebutuhan pokok melalui website dan aplikasi Bantulpedia sebanyak 12 kali, serta publikasi berbagai kegiatan pemerintah daerah. Penerbitan Surat Edaran Bupati Bantul mengenai Gerakan ASN Belanja ke Pasar Rakyat setiap hari Jumat juga menjadi salah satu bentuk komunikasi kebijakan untuk mendorong aktivitas ekonomi pasar rakyat. Rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, memperluas akses informasi harga, serta mendorong partisipasi publik dalam mendukung perekonomian lokal. Efektivitas komunikasi kebijakan ini turut terefleksi pada pergerakan IPH yang terpantau stabil dan terkendali. Kendati demikian, efektivitas komunikasi perlu terus ditingkatkan melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami, khususnya saat terjadi gejolak harga komoditas strategis. Hasil rapat koordinasi dan pemantauan juga harus ditindaklanjuti secara konkret melalui rekomendasi yang jelas, pembagian tugas antar perangkat daerah yang terukur, serta pengawasan berkala guna memastikan langkah pengendalian inflasi berjalan optimal.

5. Evaluasi Kolaborasi

Pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di Kabupaten Bantul didukung oleh kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah DIY, Bank Indonesia DIY, DPR RI, TNI/Polri, Perum Bulog, Pupuk Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, PT Madubaru, TP PKK Kab.Bantul, TVRI Yogyakarta serta kelembagaan ekonomi kalurahan. Bentuk dukungan tersebut meliputi intervensi pasar, bantuan pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, penguatan produksi pertanian dan perikanan, serta pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi. Di sisi tata kelola, TPID Kabupaten Bantul bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Bantul melalui Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa), yang menaungi program JAMASAN (Jaksa Masuk Kalurahan) dan KETAPANG SUPRA (Ketahanan Pangan Suluh Praja). Sinergi ini terbukti meningkatkan pemahaman hukum aparatur kalurahan serta mendorong pengelolaan program dan anggaran yang transparan dan akuntabel. Ke depan, kolaborasi tersebut terus diperkuat melalui pendampingan dan pengawasan sesuai kewenangan guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dalam menjaga ketersediaan pangan

dan stabilitas harga daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Penguatan produksi pangan strategis dan mitigasi risiko kekeringan

    Upaya peningkatan produksi komoditas pangan strategis, khususnya volatile food seperti cabai, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras, perlu terus diperkuat melalui pemanfaatan pekarangan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pengembangan subsektor peternakan, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Menghadapi Triwulan IV Tahun 2026, yang bertepatan dengan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), libur sekolah, serta potensi pembukaan Jalan Kelok 23 yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan permintaan pangan, diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga kecukupan pasokan dan stabilitas harga. Mitigasi kekeringan juga perlu diperkuat melalui perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan hingga 31 Desember 2026 sebagai dasar bagi BPBD Kabupaten Bantul untuk melanjutkan distribusi air bersih secara berkala ke wilayah terdampak.

    Selain itu, percepatan rehabilitasi jaringan irigasi dan pelaksanaan pompanisasi di wilayah rawan kekeringan perlu menjadi prioritas, termasuk penanganan dua titik jaringan irigasi dengan sumber anggaran Dana Keistimewaan (Danais) sebesar Rp2,4 miliar. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi pertanian dan meminimalkan risiko penurunan pasokan serta kenaikan harga pangan.

    2. Penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi produk lokal

    Penyusunan prognosa neraca pangan perlu dilakukan secara berkala sebagai dasar pemetaan ketersediaan dan kebutuhan pangan serta antisipasi potensi defisit pasokan yang dapat memicu kenaikan harga. Selain itu, penguatan hilirisasi produk perikanan melalui bimbingan teknis alih teknologi pengolahan ikan perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Upaya tersebut perlu didukung dengan optimalisasi pemanfaatan potensi pangan lokal dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar kesinambungan pasokan, ketahanan pangan, serta stabilitas harga di Kabupaten Bantul dapat terjaga.

    3. Penguatan keterjangkauan harga dan stabilisasi pasokan pangan

    Peningkatan frekuensi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan pasar murah perlu dilakukan, terutama menjelang HBKN Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kegiatan tersebut diprioritaskan pada wilayah rawan kemiskinan dan pasar pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), dengan mempertimbangkan dinamika harga dan potensi peningkatan permintaan masyarakat. Pemantauan harga dan stok pangan strategis di tingkat pedagang dan distributor juga perlu diintensifkan sebagai dasar deteksi dini dan penentuan intervensi yang tepat sasaran. Pelaksanaannya perlu didukung sinergi pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

4. Penguatan kelancaran distribusi dan konektivitas antar wilayah

Kelancaran distribusi barang perlu didukung melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi pada 16 titik lokasi Daerah Irigasi serta operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerja UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo dan UPTD Pengamatan Pengairan Winongo. Selain itu, percepatan penyelesaian rehabilitasi lima jembatan, yaitu Jembatan Jalan Dodogan–Pokoh, Kweni–Druwo, Panggang–Paker, Pedes–Surobayan, dan Sumberan, perlu diiringi dengan percepatan rehabilitasi atau peningkatan 78 ruas jalan kabupaten serta pemeliharaan sekitar 87 ruas jalan kabupaten. Peningkatan konektivitas tersebut diharapkan dapat memperlancar arus barang, mengurangi hambatan distribusi, dan mendukung efisiensi biaya logistik. Di sisi lain, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil komoditas pangan strategis perlu terus didorong, khususnya untuk komoditas sapi hidup, cabai, daging ayam ras, dan telur ayam ras, guna menjamin kesinambungan pasokan dan mengantisipasi gejolak harga menjelang Nataru.

5. Penguatan komunikasi publik dan edukasi masyarakat

Komunikasi publik perlu dioptimalkan melalui berbagai kanal informasi resmi Pemerintah Kabupaten Bantul, antara lain website, aplikasi Bantulpedia, media sosial, radio, dan media massa. Penyebarluasan informasi dilakukan secara berkala, akurat, dan mudah dipahami, khususnya mengenai perkembangan harga dan ketersediaan pangan, pelaksanaan GPM, pasar murah, operasi pasar, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Edukasi mengenai pola konsumsi yang bijak dan pemanfaatan pangan lokal juga perlu diperkuat untuk mendorong diversifikasi pangan serta mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Informasi terkait lokasi dan jadwal kegiatan pasar murah maupun gerakan pangan murah perlu disampaikan secara luas agar dapat diakses masyarakat. Upaya ini diharapkan meningkatkan transparansi informasi, kewaspadaan masyarakat terhadap dinamika harga, dan efektivitas pengendalian inflasi daerah.

6. Mitigasi risiko *imported inflation* dan kenaikan biaya produksi

Pemantauan pergerakan nilai tukar rupiah serta harga komoditas yang masih bergantung pada impor, seperti bawang putih, kedelai, pupuk, obat-obatan, dan bahan baku pakan ternak, perlu diperkuat untuk mengantisipasi kenaikan biaya produksi yang dapat mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan komoditas lokal sebagai bahan baku alternatif, penguatan kapasitas produksi dalam negeri, dan diversifikasi sumber pasokan perlu terus diupayakan guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan pasokan maupun kenaikan biaya sejak dini sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat waktu.

7. Penguatan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG

Kesiapsiagaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG perlu diperkuat untuk menghadapi HBKN Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, libur sekolah, serta potensi pembukaan Jalan Kelok 23 yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan kebutuhan energi di Kabupaten Bantul. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga, agen, pangkalan LPG, SPBU, dan instansi terkait untuk memantau kecukupan

stok, memetakan potensi peningkatan permintaan, serta memastikan kelancaran distribusi sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah antisipatif juga perlu disiapkan terhadap potensi keterlambatan distribusi, gangguan pasokan, dan antrean di SPBU maupun pangkalan LPG. Di samping itu, pengawasan penyaluran LPG bersubsidi perlu diperkuat agar tepat sasaran dan ketersediaannya tetap terjaga bagi masyarakat yang berhak. Melalui pemantauan berkala, koordinasi lintas sektor, dan kesiapan mekanisme penanganan gangguan pasokan, diharapkan risiko kelangkaan BBM dan LPG dapat diminimalkan sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah selama periode Nataru tetap berjalan lancar.

8. Komitmen dan arahan pimpinan

Komitmen dan arahan pimpinan perlu terus diperkuat melalui rapat koordinasi TPID Kabupaten Bantul guna mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan di lapangan serta memastikan tindak lanjut program berjalan efektif. Dukungan pimpinan diperlukan dalam pengambilan kebijakan strategis, termasuk penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan penyediaan subsidi angkut guna mendukung efektivitas pelaksanaan pasar murah pada Triwulan IV Tahun 2026, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

9. Penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan

Sinergi dan kolaborasi perlu terus ditingkatkan melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah DIY, instansi vertikal, TNI/Polri, Bank Indonesia, Perum BULOG, badan usaha milik daerah (BUMD), sektor swasta, pelaku usaha distribusi pangan, serta mitra strategis lainnya. Penguatan kolaborasi diarahkan pada sinkronisasi program, pertukaran data dan informasi pangan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta percepatan tindak lanjut terhadap potensi gejolak pasokan dan harga. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum sesuai kewenangannya, juga perlu dioptimalkan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel. Melalui sinergi yang berkelanjutan, upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan diharapkan semakin optimal dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis di Kabupaten Bantul.